

**PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER BRASIL PASCA PENETAPAN
KEBIJAKAN PERTAHANAN (*NATIONAL DEFENSE STRATEGY / NDS*)
TAHUN 2008**

***(THE INCREASING BRAZIL'S MILITARY CAPABILITIES POST THE
NATIONAL DEFENSE STRATEGY 2008)***

Irfantoni Listiyawan

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto, Jember, Kotak Pos 159

E-mail: irfantoni77@gmail.com

Abstract

This research will discuss the increase in military capabilities of Brazil post enactment of 2008 National Defense Strategy. The enactment of 2008 defense strategy policy impacted the increase in military capabilities of Brazil in defense sectors of land, seas, and air. The focus of analysis in this research are reasons why Brazilian government increased its military capabilities. Noted on 2008 Brazilian government increased its defense budget and military expenses by 53 percent. The budget was the largest expenses over the last decades. This increase of military capabilities of Brazil is interesting to be observed because Brazil has a principle as a pacifist country. However with the signing of Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil in 2008 indicated Brazil has wider national goals in South America region and internationally.

Keywords : defense, sovereignty, military, threat, capability

A. A. PENDAHULUAN

Pada 18 Desember 2008, Luiz Inacio Lula da Silva yang menjabat sebagai Presiden Brasil, menandatangani draf rancangan strategi pertahanan nasional yang tertuang dalam *Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil*. Rancangan strategi tersebut merupakan sebuah pedoman dan gambaran umum tentang kebijakan pertahanan dan keamanan, serta tujuan nasional yang akan dijalankan oleh Pemerintah Brasil ke depannya. Dengan dikeluarkannya rancangan strategi tersebut, berimplikasi terhadap penguatan pertahanan, terutama sektor pertahanan darat, laut dan pertahanan udara.

Pemerintah Brasil dan militer sebagai penjaga kedaulatan negara menyadari pentingnya sarana tersebut untuk menjalankan fungsi pertahanannya. Namun, keberadaan sarana mobilitas militer baik sektor laut dan udara Brasil dinilai masih kurang memadai dalam menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan sarana mobilitas pertahanan laut hingga tahun 2010. Sebanyak 318 unit militer *Marinha do Brasil* atau Angkatan Laut Brasil hanya 132 unit yang berada dalam kondisi siap tempur. Pesawat pengangkut Angkatan Udara terdapat 23 unit pesawat dalam kondisi siap tempur. Sebanyak 98 kapal tempur Angkatan Laut yang ada, terdapat 48 buah kapal tidak dapat berfungsi dengan baik. Sarana pendukung Angkatan Laut Brasil lainnya adalah helikopter, dari 67 helikopter tempur hanya 22 buah yang dinyatakan dalam kondisi siap tempur (Survincity, 2010).

Sementara itu, di sektor pertahanan udara, Angkatan Udara Brasil juga mengalami kondisi tidak jauh berbeda dengan sektor pertahanan laut. Sebanyak 789 unit pertahanan udara, hanya 357 unit yang masih lengkap dan dalam kondisi siap tempur (termasuk 48 diantaranya peluncur misil). Pesawat tempur yang ada berjumlah 208 buah, namun hanya 85 buah yang berada dalam kondisi siap tempur. Pesawat pengangkut termasuk helikopter berjumlah 298 buah, yang berada dalam kondisi siap hanya berjumlah 100 buah pesawat (73 helikopter dan 27 pesawat angkut). Kenyataan serupa juga pada matra Angkatan Darat Brasil, dari 1.953 unit kendaraan tempur termasuk tank hanya 1.079 yang masih layak untuk dioperasikan (Survincity, 2010).

Melihat fakta diatas, Pemerintah Brasil mencanangkan beberapa megaprojek modernisasi di ketiga matra dengan anggaran yang cukup besar. Seperti contoh di matra udara, salah satu proyek ambisius yang dicanangkan ialah Proyek FX-2. Proyek ini pertama kali dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Luis Inacio da Silva di tahun 2007. Tujuan dari proyek ini ialah untuk modernisasi pesawat tempur yang dimiliki Angkatan Udara Brasil atau *Forca Aerea Brasileira* (FAB) selama kurun waktu 2015-2025.

Pada sektor pertahanan darat, peningkatan kapabilitas militer dilakukan dengan akuisisi dan modernisasi armada tempur tank, yaitu dengan akuisisi 220 unit tank tempur utama *Leopard 1A5*. Selain itu Angkatan Darat Brasil juga mengakuisisi kendaraan tempur pengangkut personel *Guarani* sejumlah 2.044 unit dengan target selama duapuluh tahun serta memodernisasi teknologi misil *Astros 2020*. Pada sektor pertahanan laut terdapat proyek ambisius yaitu pembangunan kapal selam nuklir dalam program *ProSub* dan modernisasi armada kapal tempur, salah satunya kapal induk kelas ringan Sao Paulo dalam program *ProSuper*. Tercatat pada tahun 2008, Pemerintah Brasil meningkatkan anggaran pertahanan dan belanja militer sebesar 53 persen. Anggaran tersebut merupakan yang terbesar

selama beberapa dekade terakhir.

Data yang dirilis oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) menyebutkan anggaran militer Brasil dari tahun 2008 hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Anggaran Pertahanan Brasil 2008 - 2013

Tahun	Anggaran Pertahanan (dalam satuan juta US\$)	Prosentase dari GDP
2008	24.453	1.5
2009	25.654	1.6
2010	34.007	1.6
2011	36.932	1.5
2012	33.988	1.5
2013	31.456	1.4

Sumber : SIPRI, 2014. "SIPRI Military Expenditures Database". <http://portal.sipri.org/publications/pages/expenditures/country-search>

Saat ini Brasil berada pada peringkat 68 dunia dalam hal presentase anggaran militer berdasarkan GDP. Militer Brasil juga masuk dalam jajaran 15 besar negara dengan anggaran militer terbesar di dunia tahun 2012 (Trikunas, 2014:13).

Sebagai sebuah negara Brasil juga memiliki ancaman. Ancaman bagi Brasil adalah kejahatan transnasional, seperti perdagangan obat-obatan terlarang. Brasil termasuk ke dalam negara dengan konsumsi kokain dan obat-obatan terlarang terbesar di dunia hingga saat ini (The Dialogue, 2012). Hal tersebut yang membuat militer Amerika Serikat dengan dalih *War on Drugs* mulai memasuki kawasan Amerika Selatan. Kehadiran militer Amerika Serikat di Amerika Selatan membuat resah negara-negara besar kawasan seperti Argentina, Chile, Bolivia dan juga Brasil. Menteri luar negeri Brasil, Celso Amorim, menilai bahwa jumlah pasukan Amerika Serikat yang diterjunkan ke wilayah Amerika Selatan sejak tahun 2008 terlihat terlalu besar untuk sebuah operasi terhadap obat-obatan terlarang di Amerika Selatan (Tim Redaksi, 2009).

Armada keempat Angkatan Laut Amerika Serikat (*U.S Fourth Fleet*) yang beroperasi kembali memicu negara-negara Amerika Selatan meningkatkan pertahanannya, termasuk Brasil. Misi baru tersebut seperti yang dikemukakan oleh pihak Pentagon diantaranya misi kontingensi, perang terhadap

terorisme dan narkoba, serta kegiatan kerjasama pertahanan (Santana, 2008). Namun, Presiden Brasil, Luis Inacio Lula da Silva menilai bahwa keberadaan armada angkatan laut Amerika Serikat di kawasan Selatan sebagai sebuah sinyal bahwa pihak Amerika Serikat mengincar sumber cadangan minyak baru yang terbesar di lepas pantai Brasil dan memperluas pengaruhnya di kawasan Amerika Selatan. Hal ini yang membuat Pemerintah Brasil merasa resah dengan keberadaan Armada Keempat Amerika Serikat (*U.S Fourth Fleet*) di perairan Amerika Selatan. Mengingat Amerika Serikat tengah mencari kawasan sumber minyak baru setelah kawasan Timur Tengah yang menjadi pemasok utama kebutuhan minyak di negara tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tulisan ini hendak menganalisis tentang mengapa pemerintah Brasil meningkatkan kapabilitas militernya pasca penetapan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional Brasil, seperti yang tertuang dalam *Strategy of Defense: Peace and Security for* dan *Livro Branco da Defesa Nacional* tahun 2012.

B. LANDASAN PEMIKIRAN

Dalam menganalisa suatu masalah dibutuhkan beberapa teori serta konseptual yang mendukung pembahasan kasus yang diangkat dalam suatu karya ilmiah. Landasan pemikiran secara umum dapat diartikan sebagai awal pemikiran dasar yang digunakan sebagai acuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Adapun landasan pemikiran yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah teori hubungan internasional *Neorealisme*.

Teori Hubungan Internasional Neorealisme

Perbedaan antara realis klasik dengan neorealis sebagaimana dikemukakan Kenneth Waltz diantaranya terkait fokus pada struktur sebagai konsep, pergeseran pemahaman tentang kausalitas, interpretasi yang berbeda terhadap kekuatan serta level yang berbeda tentang unit analisis (Ishiyama dan Breuning, 2013:516).

Penjelasan dari perbedaan tersebut *pertama*, neorealis berpendapat bahwa struktur internasional didefinisikan oleh prinsip penataan dan oleh distribusi kekuatan. Sistem internasional adalah anarki yang didefinisikan dengan tidak adanya otoritas lebih tinggi dari negara. *Kedua*, terkait kausalitas realis klasik berpandangan bahwa dunia internasional adalah tempat negara berinteraksi dan sebab-sebab bergerak ke satu arah, jadi analisis hanya berfokus pada negara. Sementara neorealis berpendapat bahwa politik internasional dapat dipahami hanya jika efek struktur internasional ditambahkan dalam analisis level. *Ketiga*, terkait interpretasi berbeda tentang kekuatan realis klasik memandang keinginan negara tentang kekuatan pada dasarnya berakar dalam sifat manusia. Neorealis berpandangan bahwa

kekuatan sebagai alat yang bisa dipakai negara yang mungkin memiliki kekuatan kecil atau kekuatan besar. Artinya, kekuatan dapat dijadikan sebagai karakteristik sentral sebagai kombinasi kapabilitas negara. *Keempat*, terkait pembahasan pada level unit analisis, realis klasik berpandangan sistem internasional adalah anarki secara kondisi umum. Realis klasik memandang unit-unit yang berinteraksi sebagai respon terhadap lingkungan yang anarkis, hasil yang berbeda diatribusikan ke perbedaan dalam unit-unit seperti pemerintahan, ideologi, penguasa dan ideologi negara. Pada sisi lain, neorealis mengatakan bahwa strukturnya yang memediasi hasil yang dilakukan negara, bukan karena faktor internal negara tersebut (Ishiyama dan Breuning, 2013:517-518).

Dengan demikian terjadi pula perubahan struktur dunia internasional dari yang semula bipolar menjadi multipolar. Seiring berkembangnya multipolar, para pengamat memprediksi bahwa kebangkitan China, India, Rusia dan Brasil merupakan sesuatu yang realistis sebagai kekuatan baru di dunia internasional (Jepson, 2012).

Pada sistem multipolar negara berusaha untuk meningkatkan keamanan nasionalnya dengan menggunakan kapabilitas domestik seperti kekuatan militer suatu negara atau melalui aliansi dengan negara lain. Namun, menurut Kenneth Waltz pembentukan aliansi adalah sulit tercapai, karena negara yang tergabung dalam aliansi akan memperhitungkan untung-rugi (Waltz, 2000). Keuntungan dari adanya aliansi adalah negara dengan kapabilitas keamanan yang kecil akan merasa terlindungi oleh negara dengan kapabilitas yang lebih besar. Tetapi disisi lain, suatu negara juga akan merasa dirugikan karena kedaulatan negara sebagian akan diserahkan kepada aliansi. Oleh karena itu, terkadang sebuah negara melakukan *struggle for power* dengan usahanya sendiri (*self-help*) untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Berdasarkan sifatnya, dalam neorealisme strategi dapat dibedakan menjadi strategi defensif dan strategi ofensif seperti yang tertera pada berikut:

Tabel 2 Perbedaan Defensif dengan Ofensif dalam Neorealisme

Strategi	Fokus Utama	Ruang Lingkup
Defensif	Sistem internasional memberikan kesempatan untuk melakukan ekspansi, tetapi pada kondisi	Menyerang atau bertahan bisa dibedakan. Teknologi dan faktor geografi dimanfaatkan untuk bertahan.

	tertentu.	
Ofensif	Sistem Internasional selalu memberi kesempatan untuk melakukan ekspansi.	Menyerang atau bertahan tidak dapat dibedakan. Teknologi dan faktor geografi mendukung untuk menyerang.

Sumber: Abubakar Eby Hara. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa. Hal.53

Para teoritis kemudian mencoba mengemukakan pendapat mereka mengenai realisme defensif. Kenneth Waltz berpendapat bahwa peningkatan kapabilitas militer suatu negara selain dipengaruhi oleh faktor geografis juga dipengaruhi oleh tingkat populasi, kemampuan ekonomi, stabilitas politik, kekuatan militer dan daya dukung sumber daya (Waltz, 1993). Robert Jervis berpendapat bahwa dalam dunia yang anarki, suatu negara merasa cemas akan keberadaan negara lain. Kecemasan dipicu adanya distribusi kapabilitas yang bersifat relatif, dengan kata lain negara memiliki kemampuan yang berbeda dalam menjaga keamanannya. Apabila salah satu negara meningkatkan keamanannya, maka dengan sendirinya hal tersebut akan memicu negara lain untuk melakukan langkah-langkah yang sama (Taliafero, 2000).

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Charles Glaser, menurutnya suatu negara yang meningkatkan kapabilitas keamanannya bertujuan untuk *survival* dan mencegah setiap ancaman dalam sistem internasional yang anarki. Glaser berpendapat ancaman yang paling utama ialah ancaman yang datang dari negara lain (Glaser dalam Griffiths, 2007:17). Selanjutnya, Dale Copeland didalam bukunya yang berjudul *The Origins of Major War* mengemukakan bahwa kekhawatiran akan kondisi keamanan membuat negara berusaha mencegah terjadinya perang (Copeland, 2000:15).

Lebih jauh lagi, Stephen Walt berpendapat bahwa untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar dapat dilakukan dengan *balancing* yakni dengan melawan sumber ancaman atau dengan *bandwagoning* (melakukan politik pengalihan kekuatan dengan beraliansi sumber bahaya) (Hara, 2011:44). *Bandwagoning* dilakukan oleh negara yang lemah terhadap negara yang kuat dengan harapan dapat memperoleh keuntungan terutama dari segi keamanan Negara (Schweller, 1994:74). John Mearsheimer berpendapat bahwa negara menghadapi lingkungan internasional yang tidak pasti, dimana

memungkinkan bagi setiap negara menggunakan kekuatannya untuk menyerang negara lain (Griffiths, 2007:18).

Menurut Dunne dan Schmidt, perbedaan mengenai tujuan yang bersifat defensif atau ofensif juga dapat dilihat dengan berdasarkan prinsip *security maximize* atau *power maximize* (Hara, 2011:49). Bila suatu negara hanya memaksimalkan keamanannya (*security*) maka negara tersebut termasuk dalam defensif. Namun sebaliknya, jika sebuah negara memaksimalkan *power* tujuannya ialah untuk mencapai hegemoni dalam sistem internasional walaupun ada pihak yang menghalanginya (Ruizhuang dan Feng, 2006:127). Suatu negara memilih strategi defensif karena beberapa hal, diantaranya adanya anggapan bahwa kekuatan musuh lebih besar. Selain faktor kekuatan musuh, negara memilih strategi defensif karena hendak memanfaatkan kondisi geografisnya (Suryohadiprojo, 2005:121).

C. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian didalam karya ilmiah ini terbagi dua bagian, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisis data. Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan teknik penelitian studi literatur. Pengumpulan data yang digunakan lebih difokuskan pada informasi yang berasal dari buku, dokumen, jurnal dan surat kabar. Berdasarkan data-data tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan tentang mengapa pemerintah Brasil meningkatkan kapabilitas militernya di kawasan Amerika Selatan selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013 saat Brasil dibawah kepemimpinan Presiden Dilma Rousseff.

D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa Pemerintah Brasil melakukan peningkatan kapabilitas militernya. Peningkatan kapabilitas militer tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara Brasil, menghidupkan kembali industri pertahanan Brasil, sebagai respon terhadap kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan, dan sebagai upaya Brasil untuk menjadi anggota tetap DK-PBB.

Menjaga Kedaulatan Nasional Brasil

Menurut Jean Bodin sebagaimana yang dikutip oleh Gabriella Slomp, menjelaskan bahwa kedaulatan bersifat permanen dengan kata lain kedaulatan akan tetap ada selama negara itu berdiri ,

tidak berasal dari kekuasaan lain, absolut atau tidak dapat dibagi-bagi dengan artian bahwa kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan tidak dibatasi oleh siapapun. Sementara itu, menurut Thomas Hobbes dalam kedaulatan diperlukan adanya suatu perlindungan terhadap warga negara guna menciptakan perdamaian (Slomp dalam Salmon, 2008:35).

Baik pandangan Jean Bodin maupun Thomas Hobbes mengenai kedaulatan, keduanya memiliki persamaan persepsi mengenai fungsi kedaulatan. Menurut keduanya, fungsi utama dari kedaulatan adalah melindungi warga negara dari ancaman yang berasal dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) (Slomp dalam Salmon, 2008:37-38). Bagi kaum neorealis sebagaimana diungkapkan oleh Kenneth Waltz, menyatakan bahwa suatu negara berdiri atas dasar kedaulatan. Hal tersebut memiliki pengertian bahwa setiap negara memiliki cara tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah internal dan eksternalnya (Waltz dalam Jacscon dan Sorensen, 2009:114).

Kedaulatan sendiri berdasarkan sifatnya terbagi dalam dua jenis, yaitu kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Kedaulatan internal memiliki pengertian kekuasaan tertinggi berada pada negara disamping warga negara dalam batas-batas teritori atau wilayah negara. Sementara kedaulatan eksternal memiliki pengertian bahwa pada dasarnya negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam hubungan internasional dan tidak ada otoritas tertinggi dari negara tersebut (Evans dan Newnham dalam Salmon, 2008:40). Hal senada juga diungkapkan oleh Kenneth Waltz yang menyatakan bahwa masing-masing negara secara formal sama terhadap yang lain, tidak ada yang berhak memerintah dan tak ada yang perlu dipatuhi (Waltz dalam Jacscon dan Sorensen, 2009:114).

Ancaman kedaulatan bagi Brasil adalah keberadaan para gerilyawan yang tergabung dalam Tentara Revolusioner Kolombia atau *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC). salah satu potensi ancaman bagi Brasil dari FARC ialah Blok Timur atau *East Block* (EAB) dan Blok Selatan atau *South Block* (SAB). Pada Blok tersebut FARC melakukan penyelundupan obat-obatan terlarang dan senjata ilegal mulai senjata ringan seperti senapan hingga senjata berat seperti tank ringan, sistem radar dan bagian dari peralatan senjata nuklir serta sistem persenjataan udara (Pinheiro, 2006:15).

FARC mulai memasuki kawasan perbatasan Brasil kembali sejak awal tahun 2000-an pasca serangan di tahun 1991. Berdasarkan laporan dari komando militer Brasil di wilayah Amazon, pada tahun 2004 FARC merencanakan serangan terhadap militer Brasil perbatasan antara Kolombia dengan Brasil sepanjang 1.600 kilometer. Pada waktu yang sama, satelit milik Kementerian Pertahanan Brasil mengidentifikasi keberadaan gerilyawan di sekitar wilayah hutan Amazon. Menanggapi hal tersebut, Komando Militer Amazon menyebutkan terdapat 160 pria dan wanita gerilyawan di wilayah Jurupari (da Silva, 2013:31).

Mengingat FARC merupakan salah satu ancaman potensial bagi kedaulatan nasional Brasil,

pemerintah Brasil melakukan langkah-langkah dalam menghadapi gerilyawan FARC. Langkah tersebut diantaranya ialah memperkuat keberadaan militer di sekitar wilayah Amazon serta melaksanakan operasi militer yang melibatkan satuan militer serta kepolisian Brasil. Selain itu, juga dilakukan dengan memfokuskan penyebaran militer ke wilayah perbatasan tenggara dan selatan Brasil (Ministry of Defense of Brazil, 2008:13).

Selain menempatkan militer di wilayah perbatasan, pemerintah Brasil juga melaksanakan operasi militer dalam mencegah tindakan kekerasan dan penyelundupan yang dilakukan oleh kelompok FARC. Operasi militer yang dilakukan oleh Brasil adalah Operasi Poraque tahun 2008 dan Operasi Agatha dari 2011 hingga tahun 2013. Operasi Poraque bertujuan untuk memperkuat militer Brasil dalam menghadapi konflik di wilayah Amazon. Sementara Operasi Agatha bertujuan untuk mencegah tindakan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok teroris maupun gerilyawan FARC. Selain melibatkan militer, operasi tersebut juga melibatkan penegak hukum lain di Brasil seperti Polisi Federal (da Silva, 2013:46).

Pada kasus peningkatan kapabilitas militer Brasil pada penelitian ini, penulis memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Brasil tergolong dalam strategi defensif. Hal tersebut diperkuat dalam Buku Putih Pertahanan Brasil tahun 2012 yang menyebutkan bahwa tujuan dari peningkatan kapabilitas militer Brasil adalah untuk menahan serangan dari negara lain (agresor) terhadap teritori Brasil serta untuk menciptakan perdamaian nasional. Selain itu, tugas militer adalah menjaga amanat Konstitusi 1988, yang mana salah satu pokok amanat tersebut adalah menjaga kedaulatan negara seperti yang tertuang dalam Pasal 1. Apabila negara terlibat konflik dengan pihak (negara) lain, maka akan diselesaikan secara damai melalui perundingan sesuai dengan amanat Konstitusi 1988 Pasal 4 mengenai prinsip hubungan internasional Brasil. Jika proses perundingan tidak menemukan hasil dan harus diselesaikan dengan kekuatan militer, maka semata-mata ditujukan untuk melindungi kedaulatan negara dan kemerdekaan nasional (seperti yang tercantum dalam Pasal 4).

Membangun Kembali Industri Pertahanan Brasil

Dalam *National Defense Strategy* tahun 2008, pembangunan terhadap industri pertahanan nasional Brasil juga menjadi salah satu isu yang dibahas (Ministry of Defense of Brazil, 2008:54). Program pembangunan industri pertahanan tersebut diantaranya pengembangan pesawat tempur dan pesawat transport militer, kapal selam konvensional dan kapal selam nuklir, kendaraan tempur, misil, helikopter tempur dan sebagainya (Ministry of Defense of Brazil, 2008:56).

Untuk melaksanakan tujuan dari industri pertahanan, khususnya untuk ekspor diperlukan adanya komitmen yang serius dari pemerintah secara berkesinambungan. Langkah tersebut

ditindaklanjuti pemerintah Brasil dengan mengeluarkan Undang-undang No.12.598 tahun 2012 mengenai standar akuisisi, pengembangan produk dan sistem pertahanan (Tibbileti dan Donadio, 2012:155). Undang-undang tahun 2012 melengkapi undang-undang sebelumnya mengenai industri pertahanan tahun 2000, 2002, dan tahun 2005.

Saat ini Brasil memiliki pangsa pasar industri pertahanan yang cukup besar, terutama di wilayah Asia dan Amerika Selatan. Produk industri pertahanan Brasil yang memasuki pasar ekspor diantaranya jenis pesawat latih militer *Super Tucano* yang diproduksi oleh perusahaan EMBRAER dan Peluncur Roket Multilaras (MLRS) ASTROS yang diproduksi oleh perusahaan AVIBRAS. Selain kedua perusahaan bidang pertahanan tersebut terdapat pula perusahaan pertahanan yang bergerak dibidang industri angkatan laut EMEGPRON dan AMAZUL serta IMBEL dibidang industri angkatan darat (Tibbileti dan Donadio, 2012:155).

Seperti yang tercantum dalam *National Defense Strategy* tahun 2008, Brasil ingin menjadi pemain penting dalam produsen industri pertahanan terutama dalam produksi pesawat tempur. Saat ini Brasil mulai diperhitungkan dalam hal produsen alustsista internasional. Selain itu proyek kapal selam nuklir (*ProSub*) juga merefleksikan bahwa Brasil akan menjadi salah satu kekuatan baru di kawasan Amerika Selatan.

Respon Terhadap Kehadiran Militer Amerika Serikat di Kawasan Amerika Selatan

Sejarah kehadiran militer Amerika Serikat ditandai dengan dikeluarkannya Doktrin Monroe (*Monroe Doctrine*) tahun 1823 oleh Presiden Amerika Serikat saat itu James Monroe. Doktrin tersebut dikeluarkan sebagai respon terhadap politik di Eropa pasca era berakhirnya Perang Napoleon. Mengingat pasca Perang Napoleon, muncul kembali kekuatan baru yang dimotori oleh Kerajaan Inggris Raya terutama pada kekuatan angkatan laut (Gilderhus, 2006:6). Fenomena tersebut menjadikan Amerika Serikat merasa cemas bahwa keberadaan rezim kolonialisme Eropa berimplikasi terhadap negara-negara Amerika Selatan. Mengingat kawasan Amerika Selatan menyediakan peluang bagi Amerika Serikat terutama mengenai ekonomi dan untuk menyebarkan pengaruhnya, namun disisi lain Amerika Selatan juga dapat menjadi ancaman bagi Amerika Serikat (Gilderhus, 2006:9).

Penerapan Doktrin Monroe mulai kembali terlihat pada era Perang Dingin terutama di awal dekade 1960-an dibawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy, yang mulai memperhatikan kembali pentingnya Amerika Selatan bagi Amerika Serikat. Presiden Kennedy menyumbangkan dana dalam jumlah besar dengan dalih untuk kemajuan Amerika Selatan. Tahun 1965 Presiden Johnson menerapkan Doktrin Johnson yang mengacu pada Doktrin Monroe, doktrin tersebut dikeluarkan terhadap Amerika Selatan karena Amerika Serikat tidak menginginkan adanya kekuatan asing di bumi

belahan Barat (Minderop, 2006:136). Kemudian pada akhir tahun 1982 Presiden Reagan berkunjung ke Brasil dalam rangka memberikan bantuan dana sekaligus melancarkan isu anti Soviet yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Usaha Reagan tersebut tidak menghasilkan sesuatu dan hanya ditanggapi secara dingin oleh Pemerintah Brasil saat itu karena adanya ketidakpercayaan Brasil terhadap Amerika Serikat (Minderop, 2006:167).

Pada bagian ini penulis melihat bahwa bentuk kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan merupakan implementasi dari Doktrin Monroe (*Monroe Doctrine*) dalam mewujudkan *The American Dreams*. Adapun dua agenda besar yang menjadi fokus utama USSOUTHCOM, yaitu pembangunan pangkalan militer di Kolombia dan pengaktifan kembali armada keempat (*fourth fleet*) yang dimulai sejak tahun 2008. Pihak Amerika Serikat dan USSOUTHCOM berdalih kedua agenda tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan Amerika Selatan dari ancaman terorisme, dan kejahatan transnasional seperti peredaran obat-obatan terlarang dan senjata api ilegal (SOUTHCOM, 2014). Dalam perkembangannya, kedua agenda militer Amerika Serikat menuai kritikan dari sebagian negara-negara di kawasan Amerika Selatan termasuk Brasil.

Salah satu upaya Brasil dalam membendung Amerika Serikat adalah dengan memperkuat poros maritim. Adapun program penguatan poros maritim Brasil dilakukan dalam program *The Blue Amazon Project*. Program tersebut pada awalnya muncul pada tahun 2004 sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayah yurisdiksi perairan dan zona ekonomi eksklusif Brasil. Dalam pelaksanaan kebijakan *The Blue Amazon Project*, pemerintah Brasil mengembangkan kemampuan pengawasan melalui satelit dan radar jarak jauh dalam program *Blue Amazon Management System* (SisGAAz). Tujuan utama dari SisGAAz adalah untuk mengawasi wilayah sumber energi minyak di kawasan Amerika Selatan (Abdenur dan Neto, 2013:9). Selain memodernisasi kapal selam, Brasil juga memodernisasi kapal pengangkut pesawat ringan *Sao Paulo*, kapal militer tersebut termasuk dalam kapal induk ringan. Hingga saat ini tidak ada negara di Amerika Selatan yang mengoperasikan kapal pengangkut pesawat kecuali Brasil (Connors, 2005:5). Selain memodernisasi alutsista sebagai sarana memperkuat poros maritim, Brasil juga mengkonsentrasikan kekuatan Angkatan Laut (MB) di wilayah Rio de Janeiro (Ministry of Defense of Brazil, 2008:14).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Brasil cenderung menggunakan *balancing* dalam menghadapi kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan dan Atlantik Selatan. Hal ini didasarkan pada dokumen *National Defense Strategy* tahun 2008 tentang persebaran kekuatan militer. Angkatan Laut (MB) yang difokuskan di Rio de Janeiro yang bertujuan untuk melindungi sumber daya mineral terutama minyak. Sumber daya mineral yang kaya minyak tersebut adalah Santos Basin yang hanya berjarak sekitar 250 kilometer selatan Rio de Janeiro (Hiscock, 2012:208). Dengan

kandungan minyak yang mampu mencapai hingga 33 milyar barel, tidak menutup kemungkinan area tersebut menjadi incaran bagi negara besar. Kekhawatiran Brasil tersebut juga tertuang dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2012 yang menyebutkan bahwa seiring meningkatnya berbagai kepentingan di wilayah Atlantik Selatan, tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat menjadi sumber konflik di masa depan.

Upaya Brasil Menjadi Anggota Tetap DK-PBB

Upaya Brasil untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mulai tampak ketika Luiz Inacio da Silva menjabat presiden Brasil. Penulis melihat ada dua upaya yang dilakukan Brasil untuk menjadi anggota tetap DK-PBB baik melalui peran serta militer dalam misi perdamaian maupun diplomasi dengan negara lain di sidang umum PBB.

Upaya melalui perundingan dan diplomasi di sidang umum PBB dilakukan melalui strategi yang disebut *G-4 Strategy*. Strategi tersebut merupakan kerjasama antar pemerintah Jerman, Brasil, India, dan Jepang yang terbentuk sejak tahun 2004. Tujuan dari dibentuknya G-4 tersebut adalah untuk menekan PBB menata ulang struktur organisasi Dewan Keamanan, terutama bagi keanggotaan tetap dan hak veto. Selanjutnya negara yang tergabung dalam G-4 tersebut mengajukan proposal kepada PBB terkait penataan ulang struktur keanggotaan DK-PBB (Ferreira, 2012:5). Poin penting dalam proposal tersebut diantaranya :

1. Dewan Keamanan terdiri dari 25 anggota
2. Pembentukan anggota tetap DK-PBB baru yang terdiri dari enam anggota
3. Enam anggota tetap DK-PBB tersebut terdiri dari dua negara Afrika, dua negara Asia, satu negara Eropa Barat, dan satu negara Amerika Selatan dan Karibia.

Brasil melihat upaya melalui G-4 tersebut berdampak baik dalam usahanya menjadi anggota tetap DK-PBB.

Upaya yang dilakukan Brasil melalui ranah militer ialah melalui misi perdamaian dan operasi gabungan yang berada dibawah PBB. Hal tersebut juga diperkuat dalam dokumen *National Defense Strategy* tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Brasil harus lebih aktif berperan serta dalam misi perdamaian dibawah pengawasan PBB dan Kementerian Pertahanan (Ministry of Defense of Brazil, 2008:62).

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, salah satu misi perdamaian Brasil yang terbesar dalam upayanya menjadi anggota tetap DK-PBB adalah MINUSTAH. Dalam pelaksanaannya, misi perdamaian yang dipimpin Brasil tersebut mengalami peningkatan dari segi jumlah personil. Pada tahun 2005, satu tahun dari dicanangkannya operasi MINUSTAH Brasil menambah personil dari 83

menjadi 1.367 personil dan di tahun 2010 dari 1.287 personil menjadi 2.190 personil (Santos dan Cravo, 2014:3). Sementara itu, dari segi anggaran berdasarkan Buku Putih Pertahanan Brasil juga mengeluarkan anggaran dalam program MINUSTAH mencapai 1.670 juta Reais atau sekitar US\$ 1.850 juta hingga Juni 2012 (Brazilian Government, 2012:163). Dokumen *National Defense Strategy* tahun 2008 menyebutkan bahwa Angkatan Laut Brasil (MB) juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan misi perdamaian diluar wilayah yurisdiksi Brasil dibawah pengawasan PBB (Ministry of Defense of Brazil, 2008:20).

Dalam dunia multipolar yang ditandai dengan munculnya kekuatan (polar) baru jika melihat pada kawasan Amerika Selatan, Brasil berpotensi muncul sebagai kekuatan baru dalam dunia internasional. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan Brasil dalam dunia internasional, yaitu upaya untuk menjadi anggota tetap DK-PBB bisa dianggap sebagai langkah yang wajar mengingat kapabilitas militer yang dimilikinya.

E. KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan yang telah diuraikan, penulis mengambil kesimpulan bahwa alasan Pemerintah Brasil meningkatkan kapabilitas militernya yang *Pertama* menjaga kedaulatan nasional. *Kedua*, untuk membangun kembali industri pertahanan Brasil. *Ketiga*, sebagai respon terhadap pergerakan pasukan Amerika Serikat di wilayah Amerika Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Kolombia serta pengaktifan kembali armada keempat (*fourth fleet*) angkatan laut Amerika Serikat di perairan Amerika Selatan termasuk perairan Brasil. *Keempat* sebagai promosi militer Brasil di dunia internasional melalui upaya untuk menjadi anggota tetap DK-PBB.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Brazilian Government. 2012. *Livro Branco da Defesa Nacional*. Brazil: Brazilian Government.

Copeland, Dale. 2000. *The Origins of Major War*. New York: Cornell University Press.

Griffiths, Martin (eds). 2007. *International Relation Theory for the Twenty-First Century*. New York: Routledge.

Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.

Hiscock, Geof. 2012. *Earth Wars : The Battle of Global Resources*. Singapore: John Wiley & Sons Pte. Ltd

Jackson, Robert & Georg Sorensen.2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ishiyama, John T. and Marijke Breuning. 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Keduapuluh Satu: Sebuah Referensi Panduan Tematis* (terj. A.Fedyani Syaifudin). Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup.

Minderop, Albertine. 2006. *Pragmatisme: Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ministry of Defense.2008. *National Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil*. Brazilia: Ministry of Defense of Brazil.

Salmon, Trevor C. 2008. *Issues in International Relation, Second Edition*. New York: Routledge.

Suryohadiprojo, Sayidiman. 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tibbileti, Paz and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: RESDAL

Trikunas, Harold. 2014. *Brazil Rise: Seeking Influences on Global Governance*. Washington DC: The Brookings Institution

Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Abdenur, Adriana Erthal and Danilo Marcondes de Souza Neto. 2013. "Brazil's Maritime Strategy in the South Atlantic: The Nexus Between Security and Resources". *South African Institute of International Affairs*. Occasional Paper No 161-November 2013.

Ferreira, Carlos Enrique Ruiz. 2012. "Brazil as a Non-Permanent Member of the UN Security Council During the 2010-2011 term". *Friedrich Ebert Stiftung: UN Security in Focus*. November 2012.

Gilderhus, Mark T. "The Monroe Doctrine: Meanings and Implications". *Presidential Studies Quarterly*. Vol.36, No.1, Presidential Doctrine (March.,2006).

Hammond, Thomas H and Jonathan Bendor. "Rethinking Allison's Models".*The American Political Science Review*, Vol. 86, No. 2 (June 1992).

Pinheiro, Alvaro de Souza. 2006. "Narcoterorism in Latin America: A Brazilian Perspective". *JSOU Report 06-4 April 2006*.

Ruizhuang, Zhang and Liu Feng. 2006. "The Typologies of Realism". *Chinese Journal of International Politics*, Vol. 1 , 2006.

Santos, Rita and Teresa Almeida Cravo. 2014. "Brazil's Rising Profile in United Nations Peacekeeping Operation Since the End of the Cold War". *Norwegian Peacebuilding Resource Centre Report*. March 2014.

Schweller, Randall L. 1994. "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In". *International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer, 1994).

Taliaferro, Jeffrey W. 2000. "Security Seeking under Anarchy". *International Security*, Vol. 25, No.3 (Winter 2000/01).

Waltz, Kenneth N. 1993. "The Emerging Structure of International Politics". *International Security*, Vol.18, No.2 (Autumn, 1993).

Waltz, Kenneth N. 2000. "Structural Realism After the Cold War". *International Security*, Vol. 25, No. 1 (Summer 2000).

Thesis :

Connors , Michael E. 2005. *Tudo Pela Patria: The Brazilian Navy's Drive to Blue Water*. California: Naval Postgraduate School.

da Silva, Rolim Gerson. 2013. *FARC's Influences in Brazil*. Kansas: School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth.

Media Internet :

Jepson, Victoria. 2012. "Identify the Major Differences between Classical Realism and Neo-realism" _ <http://www.e-ir.info/2012/01/24/the-differences-between-classical-realism-and-neo-realism/>. (15 Mei 2014).

Muxagato, Par Bruno. 2009. "President Lula's International Ambitions And The Franco-Brazilian Strategic Partnership". <http://www.diploweb.com/President-Lula-s-international.html> (22 Oktober 2014).

Santana, Humberto. 2008. "US Navy resurrects Fourth Fleet to police Latin America". <http://www.wsws.org/en/articles/2008/05/navy-m07.html>. (08 Agustus 2014).

SIPRI. 2014. "SIPRI Military Expenditures Database". <http://portal.sipri.org/publications/pages/expenditures/country-search> (09 Oktober 2014)

SOUTHCOM. 2014. "USSOUTHCOM Main Mission". <http://www.southcom.mil/ourmissions/Pages/Our-Missions.aspx>. (18 Desember 2014).

Survincity. 2010. "Brazilian Armed Forces Need Urgent Modernization", <http://survincity.com/2010/01/brazilian-armed-forces-need-urgent-modernization/>. (Diakses pada: 09 Mei 2014).

The Dialogue. 2012. Does Brazil Need to Increase Defense Spending ??. <http://www.thedialogue.org> (Diakses pada 24 Maret 2014).

Tim Redaksi. 2009. "Lindungi Devisa Negara, Brasil Kembangkan Kapal Selam Nuklir", <http://www.suaramedia.com/amerika/2009/08/24/lindungi-devisa-megara-brazil-kembangkan-kapal-selam-nuklir>. (27 Juni 2014).

